

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah

Citra Nusa Afianti*¹, Arif Nugroho Rachman ²

^{1,2}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

*e-mail: citranusa298@gmail.com¹, arifnugroho.rachman@gmail.com²

Abstract

This research was conducted against the background of the author's observations that Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees are one source of revenue for Riau Province Regional Original Revenue. This study aims to determine the value of the effectiveness and contribution of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees from the period 2015 – 2020. The method used in this research is a quantitative method, using indicators of regional financial ratios. The results of this study indicate the value of effectiveness and the value of the contribution given by the Motor Vehicle Tax and the Transfer Fee for Motor Vehicles.

Keywords: Tax, Effectiveness, Contribution

Abstrak

Penelitian yang dilakukan ini, dilatar belakangi oleh hasil pengamatan penulis bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari kurun waktu Tahun 2015 – 2020. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Efektivitas dan nilai kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: Pajak, Efektivitas, Kontribusi

1. PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi untuk melaksanakan pemerintahannya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan(UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004). Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi. (Moh. Mahfud, 2003) . Tujuan peningkatan otonomi daerah dapat diperinci menjadi empat, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat di masing-masing daerah, meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di masing-masing daerah, dan meningkatkan demokratis kehidupan berbangsa dan bernegara (Baswir, 1998).

(Kaho, 2001) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Keuangan yang dimaksud ini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Kemampuan keuangan daerah salah satu faktor yang sangat penting guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang program pembangunan Nasional menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan daerah diarahkan mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga otonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swada masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia (UU Nomor 25 Tahun 2004).

Dalam meningkatkan pembangunan wilayah, desentralisasi diterima sebagai salah satu perangkat untuk meningkatkan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur semua pengelolaan keuangan daerah, tergantung dari pendapatan asli daerah yang semakin besar maka akan meningkatkan penghasilan daerah sehingga mengoptimalkan pembangunan yang menyeluruh, kesejahteraan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang berarti memberikan kemampuan kepada Daerah dalam mengkaji pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pemasukan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bappenda Jateng Tavip Supriyanto menyatakan pajak daerah memiliki kontribusi paling besar yakni 67% dari total Pendapatan Asli Daerah kemudian PAD sah lainnya 15%, dan sisanya retribusi, kepada Bisnis di Kantor Gubernur Jateng (Bisnis.com: 2019). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan pendapatan Rp14,401 triliun berkontribusi 54,85% dari total pendapatan daerah. Adapun sumber pendapatan lainnya dana perimbangan sebesar Rp11,766 triliun serta lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar Rp85,572 miliar. Meningkatnya PAD Jateng tahun ini, lanjut Ganjar, tidak terlepas dari kinerja BUMD yang semakin baik. Deviden yang diberikan BUMD sebagai PAD terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 14,60% per tahun 2016-2019 (Bisnis.com:2019).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pasal 1 mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai penghasilan yang diperoleh daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (UU Nomor 32 Tahun 2004,2004). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kelompok pendapatan berupa Dana Perimbangan ini di golongkan menjadi 3 jenis pendaptan yaitu Bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus. Dana perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Prinsip pemerintahan dalam mengelola keuangan berkerja untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk pegawai. Efektivitas keuangan harus jelas untuk kemakmuran masyarakat dengan daya beli masyarakat yang naik, tersedia banyak yang lapangan kerja sehingga pendapatan naik, pelayanan yang baik dan murah, serta tersedianya jaminan kesehatan. Untuk menyelenggarakan wewenangnya, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah.

Kinerja keuangan adalah sutau ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomidaerah ini dapat dilihat dari laporan pertanggung jawaban pemerintah berupa realisasi anggaran. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho, 2012). Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kineja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kesersian dan pertumbuhan (Sularso & Resianto, 2011) dalam Nugroho (2012). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah secara persial pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Teori Agensi

Anthony dan govindarajan (2007:530) menyatakan konsep keagenan merupakan hubungan atas kontrak kerja antara principal (kepala) dan agen. Kepala akan menggunakan administrasi seorang agen, untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kepala. Salah satu hal penting dalam hipotesis jabatan adalah bahwa kepala harus memiliki berbagai perbedaan pemikiran preferensi dan tujuan dengan agen. Sebuah perusahaan atau dalam asosiasi area

bisnis, investor dan bos bertindak sebagai kepala dan CEO (Presiden) dan bawahan sebagai perwakilan mereka. Dalam asosiasi area terbuka, bos bertindak sebagai administrator dan bawahan bertindak sebagai perwakilan mereka. Hubungan organisasi dalam pemerintahan dijalankan dengan memperhatikan peraturan daerah dan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan kepala. Menurut Zimmerman (1977) agency problem ini ada pada semua jenis organisasi baik itu sektor publik maupun sektor privat. Di sektor privat terjadi antara stakeholders dengan manajemennya, sedangkan di sektor publik, agency problem ini terjadi antara pemerintah dengan rakyat (masyarakat) dimana rakyat adalah principal yang mendelegasikan kewenangan dan pemerintah sebagai agen, untuk mengelola pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Dengan asumsi terkait dengan pelaksanaan keuangan daerah, pemerintah pusat adalah kepala di mana pemerintah pusat adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan dipercayakan untuk mengelola, memberikan penilaian dan kontribusi atas tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Jika presentasi keuangan daerah yang diawasi oleh pemerintah pusat, kapasitas suatu daerah untuk mengawasi aset keuangan daerah yang unik untuk mengatasi masalah mereka juga akan terpenuhi dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Pihak principal (ketua) tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari agen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan modal belanja.

Kinerja keuangan

Menurut Halim (2012:232), Kinerja keuangan daerah atau kemampuan wilayah merupakan salah satu ukuran yang dapat dimanfaatkan untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan penegasan di atas, maka cenderung dapat disimpulkan bahwa penyajian keuangan pemerintah daerah sekitar merupakan gambaran dari pencapaian suatu program/strategi yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperkirakan dengan menggunakan laporan keuangan. Sementara itu, pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan perkerjaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan adalah interaksi evaluasi terhadap tingkat kemajuan dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan/latihan dibidang keuangan untuk jangka waktu tertentu.

Pengukuran kinerja menurut Halim (2012:232) dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2012: 232-241) antara lain adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dana serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarakan potensi rill daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

c. Rasio Efisiensi

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

d. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

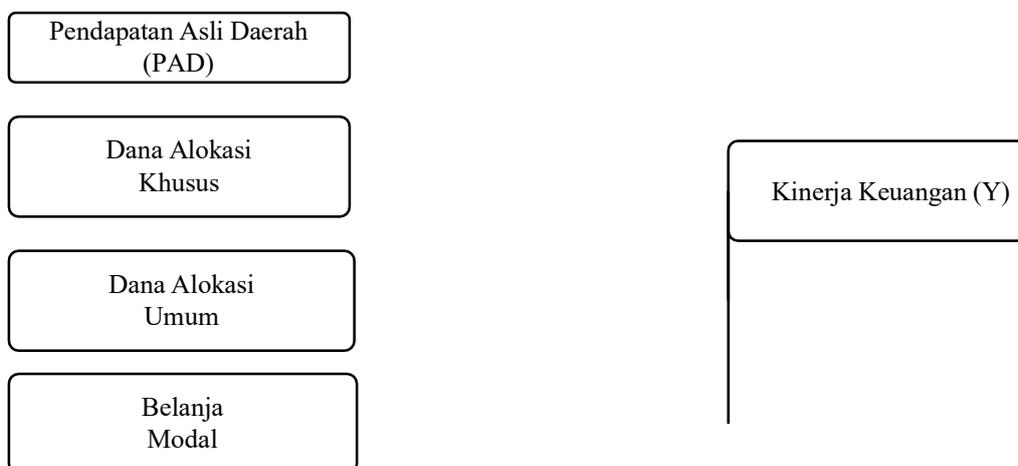
e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memperatahkan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun}(X) - \text{Pendapatan Tahun}(x-1)}{\text{Pendapatan Tahun } X} \times 100 \%$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu pencapaian hasil di bidang keuangan pada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran rasio pertumbuhan ini dapat memperlihatkan pertumbuhan dari setiap daerah dan dapat menganalisa kinerja keuangan tersebut dan dinyatakan dalam satuan presentase

Bagan 1. Kerangka pikiran



Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan

tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono 2009: 60-61). Berdasarkan dari kerangka pemikiran tersebut dapat diartikan model pemikiran tersebut terjadi satu arah yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah mempengaruhi kinerja keuangan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

H2 : Diduga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

H3 : Diduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

H4 : Diduga bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2. METODE

a) Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2016) pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang dipakai adalah dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan yang dibutuhkan secara online melalui permintaan informasi publik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang didapatkan dalam bentuk sudah jadi hasil dari pengumpulan dan pengelolaan pihak lain (Muhidin dan Abdurahman, 2007:17). Data yang digunakan berupa Laporan Keuangan Realisasi Anggaran dan Neraca Kabupaten yang beradan di Provinsi Jawa Tengah dari portal www.djpk.depkeu.go.id

b) Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis untuk menganalisa data. Untuk menganalisa data dengan analisis regresi berganda digunakan SPSS 20. Sebagai prasarat melakukan pengujian regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian memiliki sebaran data yang normal. Terdapat empat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

c) Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 berikut data kabupaten dan kota:

Metode pemilihan sampel pada penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling yang bertujuan agar memperoleh sampel yang representatif. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a) Kabupaten dan kota yang telah menyajikan laporan realisasi APBD.

b) Kabupaten dan kota yang membuat dan menyajikan laporan realisasi APBD dan yang terdaftar di situs www.djpk.depkeu.go.id tahun 2018-2020.

d) Alat analisis data

Metode analisis data menggunakan software SPSS 22 dengan cara analisis statistik data yang diolah di uji dengan uji asumsi klasik dan menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Kinerja Keuangan
- X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Alokasi Khusus X3 = Dana Alokasi Umum
- X4 = Belanja Modal
- α = Nilai Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- ε = error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis statistik deskriptif

Analisis ini yang paling banyak dipakai dan paling mendasar adalah berkaitan dengan statistik diskriptif. Dalam pembahasan ini menganalisa seperti nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata, dan standart devisiasi. Berdasarkan data yang telah diperhitungkan serperti tabel 1.

Tabel 1. Hasil statistik deskriptif.
Hasil analisis statistik deskriptif (dalam juta)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_X1	105	179224,00	2066333,00	391005,0190	288695,26195
DAK_X2	105	21485,00	1094460,00	244084,8571	147762,52198
DAU_X3	105	250593,00	1437036,00	828289,7333	301301,08567
BM_X4	105	50903,00	1228459,00	335283,2571	170830,83348
Kinerja_Keuangan_Y	105	-,63261	,21044	,0094471	,08346997
Valid N (listwise)	105				

Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dari data yang telah dikumpulkan terdapat 105 sampel dari 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2018 sampai dengan 2020, dihasilkan nilai data rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 391.005,0190 dalam juta, dengan standart devisiasi Rp288.695,26195 dalam juta. Nilai minimum dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 179.224 dalam juta yang dimiliki oleh Kota Pekalongan pada tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.066.333 dalam juta dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019.

Nilai data rata-rata Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 244.084,8571 dalam juta, dengan standart devisiasi Rp 147.762,52198 dalam juta. Nilai minimum dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 21.485 dalam juta yang dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1.094.460 dalam juta dimiliki oleh Kabupaten Grobogan pada tahun 2018.

Nilai data rata-rata Dana Alokasi Umum sebesar Rp 828.289,7333 dalam juta, dengan standart devisiasi Rp 301.301,08567 dalam juta. Nilai minimum dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 250.593 dalam juta yang dimiliki oleh Kota Magelang pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.437.036 dalam juta dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2019.

Nilai data rata-rata Belanja Modal sebesar Rp 335.283,2571 dalam juta, dengan standart devisiasi Rp 170.830,83348 dalam juta. Nilai minimum dari Belanja Modal sebesar Rp 50.903 dalam juta yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum dari Belanja Modal sebesar Rp 1.228.459 dalam juta dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2018.

Nilai data rata-rata Kinerja Keuangan sebesar 0,0094471, dengan standart devisiasi 0,08346997. Nilai minimum dari Kinerja Keuangan sebesar -0,63261 yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum dari Kinerja Keuangan sebesar 0,21044 dimiliki oleh Kabupaten Temanggung pada tahun 2020.

b. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik semua variabel dalam penelitian telah lulus uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hasil nilai kolmogorov-Smirnov dan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) dengan seluruh variabel diatas $\geq 0,05$ yang berarti data diuji berdistribusi normal.

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07983734
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,073
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Dari hasil output diatas disimpulkan bahwa nilai Signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual terdistribusi dengan normal.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD_X1	0,484	2,065
DAK_X2	0,491	2,035
DAU_X3	0,401	2,492
BM_X4	0,34	2,937

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,342 ^a	,117	,082	,07998967	1,756

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa nilai hasil Durbin Watson Autokorelasi yaitu syarat nya agar tidak terjadi autokorelasi yaitu nilai DW lebih besar dari DU dan DW lebih kecil dari 4 -DU. Hasil dari DW sebesar 1,756 lebih besar dari DL yaitu 1,6038. DW sebesar 1,756 lebih kecil dari 4- DU yaitu 2,2383. Dari hasil tersebut disimpulkan tidak terjadi Autokorelasi sehingga uji asumsi klasik terpenuhi dan layak diuji.

Pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R2). Hasil pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa tengah secara simulatan diperoleh nilai koefisien determinasi Nilai R Square (R2)

0,117. Nilai ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 11,7%, sisanya 88,3% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Koefisien korelasi (R) = 0,342 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 34,2%, artinya Pendapatan Asli Daerah(X1), Dana Alokasi Khusus(X2), Dana Alokasi Umum(X3) dan Belanja Modal(X4) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan daerah.

c. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil dari pengolahan data melalui metode analisis linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa tengah selama periode 5 tahun. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,059	,024		-2,488	,015
	PAD_X1	-4,289E-08	,000	-,148	-1,099	,275
	DAK_X2	3,180E-09	,000	,006	,042	,967
	DAU_X3	5,464E-08	,000	,197	1,330	,187
	BM_X4	1,158E-07	,000	,237	1,471	,144

Berdasarkan hasil pengerjaan di atas di peroleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = -0,059 - 4,289E-08 X1 + 3,180E-09 X2 + 5,469E-08 X3 + 1,158E-07 X4$$

Arti dari angka angka ini sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) adalah -0,059; maka dapat diartikan jika PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal nilainya adalah 0, maka kinerja keuangan daerah nilainya -0,059.
- Nilai koefisien regresi variable PAD (Pendapatan Asli Daerah) bernilai negatif yaitu -4,289E-08; ini diartikan apabila variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) turun sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan menurun juga sebesar -4,289E-08 begitupun sebaliknya.
- Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 3,180E-09 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Dana Alokasi Khusus naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan naik juga sebesar 3,180E-09 begitupun sebaliknya.
- Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 5,469E-08 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Dana Alokasi Umum naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan naik juga sebesar 5,469E-08 begitupun sebaliknya.
- Nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar 1,158E-07 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Belanja Modal naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan naik juga sebesar 1,158E-07 begitupun sebaliknya.

f. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Hipotesis F

Tabel 6. Uji Hipotesis F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,085	4	,021	3,312	,014 ^b
Residual	,640	100	,006		
Total	,725	104			

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama – sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tabel diatas dapat diperoleh F hitung sebesar 3,312 dan nilai Signifikansi sebesar 0,014, maka diperoleh F tabel sebesar 2,46. Fhitung > f tabel (3,312 > 2,46) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,014 maka menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa tengah.

Uji Hipotesis T

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil analisis uji t yang di perlihatkan dari tabel 8. Pada kolom t dan sig. Dengan kriteria

jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 berarti hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan, maka dapat dianalisis hasil dari tabel 8. PAD, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Hipotesis T

Model	t	signifikan
konstanta	-2,488	,015
PAD_X1	-1,099	,275
DAK_X2	,042	,967
DAU_X3	1,330	,187
BM_X4	1,471	,144

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai t hitung pada Pendapatan asli daerah sebesar -1,099 dan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan ($\alpha/2$; n-k-1) atau (0,025;100) adalah 1,98397. Nilai sig. Penelitian adalah 0,275 dan nilai α 0,05. Jadi nilai t hitung < nilai t tabel (-1,099 < 1,98397) dan nilai sig. Penelitian dan nilai sig > nilai α (0,275 > 0,05). Maka Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020 atau hipotesis H1 ditolak dan Ho diterima. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah artinya setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan (Mulia Andirfa, Dr.Hasan Basri, M.Com, CA, Dr. M.Shabri A.Majid, SE, 2016) dan (Rakhmini, 2017) yang membuktikan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Telah

diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerahnya masing-masing guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah dan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan yang berarti setiap turunnya PAD sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan menurun juga sebesar $-4,289E-08$ begitupun sebaliknya.

Penelitian ini diukur dengan Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memperatahkan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah tersebut. Sebagai contoh, PAD yang diterima Kota Pekalongan pada tahun 2018 dengan nilai minimum yakni sebesar Rp. 179.224.408.698 yang merupakan PAD paling rendah dari 35 kabupaten/kota lainnya selama periode 2018-2020. Sedangkan PAD yang paling tinggi diterima oleh kota Semarang pada tahun 2019 yakni dengan nilai maksimum sebesar Rp. 2.066.333.418.588, yang merupakan PAD paling tinggi dari 35 kabupaten/kota lainnya selama periode 2018-2020. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai t hitung pada dana alokasi khusus sebesar 0,42 dan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan $(\alpha/2; n-k-1)$ atau $(0,025;100)$ adalah 1,98397. Nilai sig. Penelitian adalah 0,967 dan nilai α 0,05. Jadi nilai t hitung < nilai t tabel ($0,42 < 1,98397$) dan nilai sig. Penelitian dan nilai sig > nilai α ($0,967 > 0,05$). Maka dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020 atau hipotesis H_2 ditolak dan H_0 diterima.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah dan berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan yang berarti setiap naiknya Dana Alokasi Khusus sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan naik juga sebesar $3,180E-09$ begitupun sebaliknya. Dari hasil ini bahwa Dana Alokasi Khusus masih belum dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan tapi berpengaruh secara positif.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai t hitung pada dana alokasi umum sebesar 1,330 dan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan $(\alpha/2; n-k-1)$ atau $(0,025;100)$ adalah 1,98397. Nilai sig. Penelitian adalah 0,187 dan nilai α 0,05. Jadi nilai t hitung < nilai t tabel ($1,330 < 1,98397$) dan nilai sig. Penelitian dan nilai sig > nilai α ($0,187 > 0,05$). Maka dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020 atau hipotesis H_3 ditolak dan H_0 diterima.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masyarakat. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah dan berpengaruh secara

positif terhadap kinerja keuangan yang berarti setiap naiknya Dana Alokasi umum sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah akan naik juga sebesar $5,469E-08$ begitupun sebaliknya. Dari hasil ini bahwa Dana Alokasi umum masih belum dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan tapi berpengaruh secara positif.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai t hitung pada belanja modal sebesar 1,471 dan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan $(\alpha/2; n-k-1)$ atau (0,025;100) adalah 1,98397. Nilai sig. Penelitian adalah 0,144 dan nilai α 0,05. Jadi nilai t hitung < nilai t tabel (1,471 < 1,98397) dan nilai sig. Penelitian dan nilai sig > nilai α (0,144 > 0,05). Maka belanja umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020 atau hipotesis H_4 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil uji nilai statistik dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini untuk variabel Belanja Modal membuktikan bahwa H_4 ditolak tetapi koefisiennya menghasilkan angka positif yang artinya terdapat ada pengaruh yang signifikan antara variabel Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa, tinggi rendahnya Belanja Modal tidak mempengaruhi dalam meningkat atau menurunnya kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Leki & , Amran T. Naukoko, 2018), dan (Joni Fernandes, 2022) yang membuktikan bahwa bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah belum mampu menarik motivasi publik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, realisasi belanja modal yang cenderung lambat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah menyebabkan belanja modal belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini yang menyebabkan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah

4. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat disimpulkan Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*.
- Darwanis dan Ryanda Saputra (2014). "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183-199.
- Leki, Y., & , Amran T. Naukoko, J. I. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

- Mulia Andirfa, Dr.Hasan Basri, M.Com, CA, Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M. E. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan. 30–38.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*.
- Priyono, N., Fatimah, A. N., & Nurcahya Army, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*.
- Puspita Ayu, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*.
- Rakhmini, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 219–223.
- Sularso, havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37.
- Zimmerman, L. J. (1977). *The Municipal Accounting Maze : An analysis of political incentives*. *Journal Accounting Research*, 15, 107–144.
- Buku:
- Abdul Halim dan Syam kusufi. (2012). *Akuntansi Sekto Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Abdurahman dan Muhidin. (2007). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Abdul Halim. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Anthony, Robert N dan Govindarajan. (2007). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat
- Baswir, R. (1998). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE.
- Charless T Horngren, Gary L Sundern, David Burgstahler, J. S. (2016). *Pengantar AKUNTANSI MANAJEMEN (16th ed.)*. ERLANGGA
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Kaho, Y. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

- Krismiaji, Y. A. A. (2019). Akuntansi Manajemen (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Priyatno, D. (2014). SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis. CV ANDI OFFSET.
- Sartono, A. (2000). Manajemen Keuangan. BPFE
- Sarwono, J. (2006). Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS. CV ANDI OFFSET.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (MIXED METHODS). BANDUNG: Alfabeta
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). MANAJEMEN PUBLIK. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moh. Mahfud, M. (2003). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia : studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan (2nd ed.). Rineka Cipta
- Bisnis.com.(2019). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Melampaui Target. diakses Desember 10, 2020, dari <https://semarang.bisnis.com/read/20190821/536/1139295/realisasi-pendapatan-asli-daerah-jawa-tengah-melampaui-target>.
- Bisnis.com. (2019). 2020, Jateng Targetkan PAD Capai Rp15,89 Triliun. Diakses Desember 10, 2020, dari <https://semarang.bisnis.com/read/20191113/535/1169967/2020-jateng-targetkan-pad-capai-rp1589-triliun>.
- Departemen keuangan. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2020, diakses Januari 20, 2021. www.djpk.depkeu.go.id